



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET

NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI

BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap indikator kegiatan utama Reformasi Birokrasi General dan Tematik pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);

3. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET 2020-2024.

Pasal I

Mengubah Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 pada Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 MEI 2024

Tabel 3.2. Kegiatan Utama RB General Sekretariat Kabinet

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan RB							
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	13,88	14	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
3	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.40	3.5	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan RB							
4	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,5	0,5	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Terintegrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,17	82	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro AKRB	Seluruh Unit Kerja
6		Indeks Perencanaan Pembangunan	99,85	99,85	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro Renkeu	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2,1	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan RB							
8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	62,63	63	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,13	95,13	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro Renkeu	Seluruh Unit Kerja
10		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.57	3.7	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
11	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2	2,5	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Asdep Humaspro dan Pusdatin	Asdep Humaspro dan Pusdatin
12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	-	-	-	-	-



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan RB							
13	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	55,59	-	-	-	-
14	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,10	1,11	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusdatin	Pusdatin
15	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	59,05	65	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	329	350	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
17	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4.53	4.53	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusbinter	Pusbinter



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan RB							
18		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	-	-	-
Sasaran Strategis RB							
19	Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,02	3,02	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
20	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Terintegrasi	Capaian Prioritas Nasional	97,55	97,55	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro AKRB	Seluruh Unit Kerja
21		Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	88,88	88,88	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro AKRB	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Sasaran Strategis RB							
22	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	5 (WTP)	5 (WTP)	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
23		Tindak Lanjut Rekomendasi	95,4	100	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
24	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	1,95	61,1	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
25	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75,78	80	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Nilai/ Baseline 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
Sasaran Strategis RB							
26	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95,05	95,05	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Kedeputian DKK	Kedeputian DKK
					Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Pusbinter	Pusbinter



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Tabel 3.3. Kegiatan RB Tematik Sekretariat Kabinet

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Impelementasi
			2023	2024			
Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan dan upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari berbagai sisi dengan kolaborasi tingkat K/L dalam memperkuat upaya konvergensi program	- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan - Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan terkait pengentasan kemiskinan	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Asisten Deputi Bidang Sosial Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Peningkatan Investasi	Terwujudnya rekomendasi atas upaya penyelesaian hambatan investasi dalam permasalahan regulasi khususnya yang mengatur terkait implementasi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	Persentase rekomendasi kebijakan atas upaya penyelesaian hambatan investasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Impelementasi
			2023	2024			
	Fasilitasi Penanaman Modal (DAK NFFPM) bagi daerah						
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting	Terwujudnya rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan digitalisasi pemerintahan dalam penanganan stunting	Persentase rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan digitalisasi pemerintahan dalam penanganan stunting kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden	-	100%	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Deputi Bidang Polhukam	1. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika; 2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Peningkatan Penggunaan	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh	Efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Peningkatan	100%	100%	Deputi Bidang	Biro Umum	Biro Umum



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Impelementasi
			2023	2024			
Produk Dalam Negeri	pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)			Administrasi c.q. Biro AKRB		
Pengendalian Inflasi	Tersedianya aplikasi yang berisi data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Jumlah aplikasi yang menyediakan data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	1 unit	-	Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro AKRB	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
	Tersusunnya laporan komprehensif yang memuat	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Deputi Bidang	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Impelementasi
			2023	2024			
	rekomendasi kebijakan dalam rangka mencapai tingkat inflasi di tahun 2024 agar sesuai dengan sasaran inflasi di APBN 2024 sebesar 2,5% ±1% (yoy)	dalam rangka mencapai target Indeks Harga Konsumen/Inflasi 2024			Administrasi c.q. Biro AKRB		Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

